

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA (STUDI KASUS OBJEK WISATA BUKIT JAMUR DI KECAMATAN BUNGAH GRESIK)

Nanik Hamidah

Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
nanikhamidah8@gmail.com

Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd
Dosen Pembimbing Mahasiswa

Abstrak

Objek wisata Bukit Jamur mempunyai daya tarik wisata yang memikat serta dapat membangkitkan rasa ingin tahu seseorang karena letaknya yang berada di tengah di kelilingi bukit kapur dan sawah. Bukit Jamur mempunyai keunikan tersendiri yaitu batuananya berbentuk jamur dan terbentuk secara alami. Bukit Jamur ini menjadi sangat penting ketika dapat menjadi penunjang perekonomian bagi para pemuda desa dan warga sekitar yang ingin mengembangkan objek wisata tersebut. Partisipasi dalam bentuk koordinasi dari masyarakat merupakan langkah awal untuk membangun kerjasama antara pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai pendorong suksesnya kebijakan tersebut dalam rangka pengelolaan objek wisata. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui potensi kepariwisataan yang ada di Gresik untuk itu penulis mengambil judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi Kasus Objek Wisata Bukit Jamur di Kecamatan Bungah Gresik)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Bukit Jamur di Kecamatan Bungah, yang terdiri dari : a) bentuk interaksi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, b) bentuk-bentuk koordinasi antar masyarakat dengan objek wisata dan pemerintah daerah, c) pola partisipasi antar masyarakat dengan objek wisata.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana peneliti akan menggunakan berbagai sumber data yang digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komperhensif berbagai aspek individu, kelompok, program, organisasi dan peristiwa secara sistematis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi, penyajian, dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan yang di pilih dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk interaksi sosial diawali dengan kerjasama antara perusahaan dan masyarakat, lahan penambangan dulunya merupakan lahan warga yang tidak bersertifikat setelah itu pada tahun diatas 1985 lahan tersebut dibeli oleh CV Bhumi Shakti yang akan digunakan sebagai penambangan, hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat menyebabkan adanya kerjasama yang berkelanjutan dengan partisipasi warga dalam koordinasi pengelolaan wisata Bukit Jamur. Interaksi sosial yang terjadi dapat membentuk sebuah pola koordinasi horizontal dan vertikal. Koordinasi vertikal berkisar pada lembaga yang lebih tinggi setingkat yaitu dinas pariwisata, perusahaan, Kepala Desa berupa sumbangan pikiran secara nyata dengan membuat perubahan sistem kerja perusahaan. Warga desa yang melakukan koordinasi horizontal yaitu Linmas, karang taruna, Satpam, Polsek Bungah suatu lembaga yang sederajat bentuk koordinasi mereka berupa sumbangan tenaga, pikiran dan mempunyai tanggung jawab terhadap ke amanan area wisata, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara interaksi dengan koordinasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Bukit Jamur. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung berupa ide atau gagasan untuk kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Partisipasi langsung berupa sumbangan fisik dari pengelola wisata yaitu berupa penjagaan keamanan dan menjual makanan serta minuman.

Kata kunci: *Interaksi, Koordinasi, Partisipasi*

Abstract

Bukit jamur tourist object is very interesting . It makes someone eager to know it, because the location is surrounded by mushroom hill and rice field. Bukit Jamur is very unique the shape of the stone is like mushroom, it is very natural. Bukit jamur is very important while it is supporting economically to the people the youth in this village actually want to develop this place. The participation between people and government is needed to bring it reality. Based on the above background of study, researcher is interested to research and want to know the potential tourist object in Gresik , so that the writer takes a title” The people partisipation to organize tourism object”. The purpose of research is to describe the people participation in managing Bukit Kapur tourist object in Bungah region ,Gresik which consist of a). the people interaction in managing tourist

object. b). the form of coordination between people who manage the tourist object and government. c). how to participate between people and tourist object.

The method used in the research is qualitative which the researcher will use some sources to research and explain comprehensively in accordance with individual, group, program, organization and systematical. The data collecting technique uses observation, interview and documentation. Analysis technique uses three stages, they are reduction, presentation and conclusion which get from the result of observation and interview with the informan chosen by using 'purposive and snowball sampling technique'.

The result of research show that social interaction begins with the cooperation between people and company, the mining area was not sertificate, after the year of 1985 this area bought by CV Bhumi Shakti and used for mining area. Good relations between the company and the community led to an ongoing collaboration with citizen participation in travel management coordination hill mushrooms. Social interactions that occur can form a pattern of vertical and horizontal coordinaton. Vertical coordination at higher level institutions such as tourism agencies, companies, village heads in the form of donations og mind to make the system changes the company's work. Villagers that did horizontal coordination is youth, well, security guards, police and stution that equals the coordination of their form of energy, thoughts, have responsibility for the security of travel. So it can be concluded that there is a relationship between interaction with community coordination in the management of fungal hilltravel. Community participation indirectly in the form of an idea of an idea or the idea of a common interest in development planning decisions. Direct participation in the form of physical contribution of tourism operators in the form of peace-keeping and selling food and drinks.

Keywords: participation, interaction, coordination

PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata yang berhasil merupakan pembangunan pariwisata yang dilakukan secara bersama termasuk membangun bersama masyarakat sehingga pembangunan pariwisata dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial maupun budaya kepada masyarakat setempat. Tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, maupun budaya dari pembangunan pariwisata, memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Masyarakat haruslah selalu di libatkan dalam pengelolaan areal tempat wisata, pelibatan tersebut seharusnya mulai dari perencanaan, yaitu apapun yang ingin di programkan oleh pengelola tempat wisata di diskusikan dengan masyarakat dengan harapan masyarakat akan merasa memiliki program tersebut dan turut membantu kelancaran program tersebut.

Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk terbesar dari pada pulau-pulau yang lain. Pulau Jawa menjadi pusat pertumbuhan berbagai sektor seperti industri, jasa, transportasi politik dan lain sebagai. Jawa Timur khususnya Kabupaten Gresik memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi material tertentu. Potensi tersebut di dimanfaatkan oleh sejumlah pihak dengan menggunakan sebanyak mungkin sumber daya tersebut untuk kepentingan bersama maupun pribadi.

Kabupaten Gresik, yang berbatasan dengan Surabaya, juga terkenal sebagai salah satu kota industri di Jawa Timur beberapa industri besar berada di sini, seperti industri semen, petrokimia, dan peralatan elektronik namun selain kawasan

industri, Kabupaten Gresik sebagai daerah dengan beberapa objek-objek wisata diantaranya sudah dikembangkan oleh dinas pariwisata menjadi objek wisata dengan *feature* berbeda-beda, Kabupaten Gresik sebagian tanahnya adalah kapur jadi terdapat beberapa kawasan penambangan kapur terdapat bukit kapur karena sebagian besar merupakan tanah kapur yang tandus dan selain dimanfaatkan sebagai area pertambangan kapur namun bekas dari pertambangan dapat dijadikan sebagai daerah wisata yang mempunyai keunikan tersendiri salah satunya adalah Bukit Jamur Gresik.

Pembangunan adalah proses partisipasi, secara lebih luas, partisipasi di pandang sebagai suatu proses yang dinamis dan berdimensi jamak. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya berarti pengarahan tenaga kerja masyarakat secara sukarela, akan tetapi justru yang lebih penting adalah tergeraknya masyarakat untuk mau memanfaatkan kesempatan memperbaiki kualitas hidupnya. Partisipasi berarti peran serta dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Besarnya manfaat pembangunan yang dapat di nikmati oleh masyarakat pelaku partisipasi sangat tergantung pada besar dan mutu peransertanya dalam proses pembangunan itu, sedangkan besar dan mutu peran sertanya dalam proses pembangunan tergantung pada tingkat kemampuan serta kesempatannya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut (Hilyana, 2001:29).

Objek wisata Bukit jamur yang terletak di Dusun Karangpoh, Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik merupakan destinasi wisata yang mempunyai daya tarik wisata yang memikat serta dapat membangkitkan rasa ingin tahu seseorang karena letaknya yang berada di

tengah di kelilingi bukit kapur dan sawah, bukit jamur mempunyai keunikan tersendiri yang lain dari pada yang lain bukit jamur mempunyai batuan yang berbentuk jamur dan terbentuk secara alami. Pengembangan pariwisata akan kurang berarti apabila masyarakat lokal itu sendiri tidak ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata. Partisipasi dari masyarakat merupakan langkah awal untuk membangun kerjasama antara pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai pendorong suksesnya kebijakan tersebut dalam rangka pengembangan objek wisata.

Hasil studi pendahuluan peneliti di lapangan ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata di area penambangan tidak mempunyai struktur kepengurusan yang jelas menyebabkan masalah antar pengelola sehingga mempengaruhi interaksi antar pengelola objek wisata. Objek wisata yang dikembangkan oleh perusahaan belum memiliki izin resmi dari pemerintah daerah namun disini partisipasi masyarakat dengan berkoordinasi bersama perusahaan dan kepala desa menjadi pendorong utama dibukanya wisata dan sebagai pengelola wisata merupakan modal utama kemajuan dan keberlanjutan pengembangan objek wisata. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata didukung penuh oleh pemerintah daerah karena memberikan nilai yang baik bagi tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka itu perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi Kasus Objek Wisata Bukit Jamur di Kecamatan Bungah Gresik)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Bukit Jamur di Kecamatan Bungah, yang terdiri dari : a) bentuk interaksi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, b) bentuk koordinasi antar masyarakat dengan pemerintah daerah, c) pola partisipasi antar masyarakat dengan objek wisata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana peneliti akan menggunakan berbagai sumber data yang digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, program, organisasi dan peristiwa secara sistematis, peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang diselidiki dan bila mana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2002 : 1).

Lokasi penelitian ini difokuskan pada satu wilayah studi, yaitu objek wisata Bukit Jamur yang berada di Dusun Karangpoh, Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

Informan dalam penelitian ini, meliputi : a) Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik, b) Pengelola Bukit jamur, c) Kepala Desa, d) Perusahaan, dan e) Masyarakat sekitar area wisata. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi : a) Observasi, b) Wawancara, dan c) Studi dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a) Reduksi data, b) Penyajian data dan c) Verifikasi/penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data meliputi a) Uji kredibilitas, b) *transferabilitas*, c) *dependabilitas* dan d) *konfirmasiabilitas*.

HASIL PENELITIAN

1. Interaksi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata

Interaksi antara masyarakat dengan objek wisata adalah dengan melakukan koordinasi melalui langkah-langkah seperti yaitu dari ide dari masyarakat sekitar Bukit Jamur yang melihat bahwa Bukit Jamur telah dikenal banyak orang melalui media sosial dan masyarakat sekitar mendesak perusahaan sebagai pemilik lahan untuk membuka area penambangan sebagai tempat wisata, ide dari masyarakat awalnya disampaikan kepada Kepala Desa setelah itu Kepala Desa menindaklanjuti masyarakat dengan menyalurkan serta menyampaikan ide kepada perusahaan melalui penyampaian kata-kata, ide dari masyarakat diterima oleh perusahaan selaku pemilik lahan (penangkap berita), kata-kata menjadi ide untuk penerima berita dan membuat perusahaan membuat ketetapan besar serta memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa Bukit Jamur dapat dibuka pada hari minggu saat penambangan libur karena pertimbangan keselamatan pekerja dan pengunjung yang dikelola langsung oleh masyarakat.

Interaksi masyarakat dengan objek wisata merupakan hubungan yang sudah terjalin sangat lama karena lokasi tempat tinggal yang berdekatan, hubungan baik antar masyarakat dan pemilik lahan objek wisata terjalin baik sejak masyarakat menjual lahannya kepada perusahaan pada tahun diatas 1985, masyarakat menjual lahannya karena harga yang ditawarkan saat itu sangat tinggi dan lahannya tidak begitu subur untuk ditanamai yang kemudian memunculkan interaksi sosial antara masyarakat dengan objek wisata.

Hubungan kerjasama tersebut berlangsung hingga dibukanya wisata. Kelompok karang taruna beserta Perlindungan masyarakat

(LINMAS) gotong royong berupa tenaga, dan pikiran untuk mengembangkan wisata sebuah proses yang saling pengertian dan kerjasama timbal balik antar orang atau kelompok satu dengan lainnya, dimana proses ini menghasilkan pencapaian tujuan bersama-sama kerjasama timbal balik yang dilakukan masyarakat diawali dengan tindakan tersebut menjadikan berlanjutnya suatu proses-proses interaksi selanjutnya yang berupa kegiatan sosial. Kelompok karang taruna beserta Linmas gotong royong berupa tenaga, dan pikiran untuk mengembangkan wisata yang disebut sebagai tindakan sosial yang berupa materil yang berasal dari perusahaan.

Pengelolaan objek wisata tidak ada ketentuan pembagian jadwal jaga keamanan yang jelas dari pihak pengelola wisata maupun perusahaan yang menyebabkan adanya kecemburuan sosial dan rasa saling iri antar individu, kondisi Bukit Jamur saat siang hari panas dan sore hari dingin serta sejuk menyebabkan pengunjung banyak datang disore hari karena itu penghasilan jaga sore bisa dua kali lipat lebih banyak daripada saat jaga dipagi hari keadaan tersebut dapat memicu adanya protes pembagian jadwal dan keinginan masing-masing untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya antar pengelola. Konflik yang terjadi antar individu-individu dan kelompok dalam proses sosial diantara mereka pada suatu masyarakat.

Anggota kelompok Linmas yang mengetahui potensi dan warga yang mengetahui kondisi kawasan memanfaatkan adanya pengunjung dan ikut berinteraksi secara sukarela namun dalam proses sosial tersebut terdapat persaingan setiap orang mencari keuntungan masing-masing sehingga timbul kepentingan individu dalam pencapaian sebuah tujuan pengembangan objek wisata. Informan mengatakan bahwa adanya kegiatan sosial untuk memperbaiki jalan terobosan ke Bukit Jamur agar tidak dilewati pengunjung karena berbahaya yang diadakan pengecekan pembatas jalan setiap minggu oleh beberapa pengelola saja sehingga terjadi kecemburuan sosial. Kegiatan ini saat musim penghujan tidak dilakukan karena jalan cukup berbahaya untuk dilewati sepeda maupun berjalan kaki, sementara perkumpulan di lakukan oleh Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan perusahaan saat ada pengunjung khusus.

2. Bentuk Koordinasi Masyarakat Dengan Objek Wisata Dan Pemerintah Daerah

Bentuk koordinasi antar masyarakat dengan pemerintah daerah merupakan koordinasi yang terjadi antara lembaga yang lebih tinggi setingkat dengan lembaga lainnya

sebagai pemegang kekuasaan yang menjadi pendorong dibukanya tempat wisata di area penambangan yaitu dinas pariwisata, perusahaan, Kepala Desa, yang sudah terjalin dan bersama berusaha mengembangkan wisata dengan membuat perubahan sistem kerja perusahaan yang awalnya operasional penambangan di lakukan pada hari senin sampai minggu di ubah menjadi hari senin sampai sabtu walaupun perusahaan mengalami kerugian yang tidak sedikit namun demi pengembangan area sebagai tempat wisata perusahaan rela dan agar dapat memberi manfaat bagi warga sekitar perusahaan.

Koordinasi vertikal terjadi secara formal namun tidak bersifat terikat antara dinas pariwisata, perusahaan, Kepala Desa, koordinasi ini awalnya terjadi karena tuntutan dari masyarakat untuk membuka tempat penambangan bagi umum sebagai objek wisata agar dapat memberi manfaat bagi warga sekitar melalui koordinasi ini menyebabkan perubahan sistem operasional yang semula dari hari senin sampai minggu menjadi senin sampai dengan resiko kerugian yang dialami oleh perusahaan, dibukanya wisata hari minggu oleh perusahaan agar tidak membahayakan keselamatan pengunjung. Bentuk koordinasi sebagai ciri khas dari kawasan wisata Bukit Jamur yaitu adanya suatu proses kerja sama yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya suatu tujuan sebagai bentuk pelestarian dan pembangunan wisata.

Koordinasi secara horizontal terjadi antara lembaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama meliputi masyarakat yang menjaga keamanan area wisata meliputi Polisi sektor, Satuan pengamanan (Satpam), dan Linmas. Koordinasi tersebut menjadi penggerak utama sektor wisata. Polisi sektor Kecamatan Bungah melakukan koordinasi karena sudah menjadikan Bukit Jamur sebagai objek vital yang harus di jaga keamanannya agar pengunjung yang datang berkunjung merasa nyaman dan aman ada di tempat tersebut. Satpam dan Linmas bekerjasama menjaga keamanan sepeda dan pengunjung agar tidak memasuki area penambangan aktif yang berbahaya bagi keselamatan mereka.

Koordinasi terjadi secara non formal karena mereka melakukannya di jalan area wisata dan hanya mengobrol biasa namun koordinasi ini terjadi secara berkelanjutan setiap minggunya dengan pembagian tugas jaga di luar dan di dalam area wisata jadi mereka berperan langsung sebagai *stake holder* atau pelaku utama penggerak sektor wisata. koordinasi horizontal, selain itu ada masyarakat yang melakukan interaksi karena kekuasaan yang mereka miliki mulai awal dibukanya

wisata dan menjadi pengembang wisata serta pendorong dibukanya area penambangan sebagai tempat wisata secara sukarela gotong royong sampai saat ini membangun wisata. Tindakan sosial yang mereka lakukan dilatarbelakangi oleh faktor jabatan yang mereka miliki, desakan masyarakat, hubungan pribadi, dan mengurangi pengangguran para pemuda desa. Pihak pemerintah di karenakan untuk mendorong agar wisata dibuka untuk umum dan mengembangkan potensi yang sudah ada dan perangkat desa di karenakan memang sudah mempunyai ikatan dengan pihak perusahaan dan ingin menunjukkan bahwa desa juga memiliki potensi untuk mengelola.

Masyarakat dimana perusahaan sebagai pemilik lahan memegang peran dibukanya wisata dengan konsekuensi mengalami kerugian namun untuk pengembangan wisata pemilik lahan tidak mempermasalahkan kerugian itu hal ini terjadi akibat bentuk dari keinginan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Koordinasi yang telah terjadi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat Desa Bungah menjadi pendorong dibukanya objek wisata yang terletak di area bekas penambangan dibuka untuk umum, namun disini yang melakukan koordinasi sebagian besar merupakan kelompok pemuda yang di latarbelakangi oleh faktor agar memperoleh penghasilan, mengurangi pengangguran pemudanya, mempromosikan perumahan baru, serta mengelola potensi yang ada, dan karena ikatan persahabatan, sementara di pihak perusahaan untuk membantu warga sekitar mengembangkan potensi dan memberdayakan warga lokal. Masyarakat yang menjadi *stakeholder* wisata adalah warga yang mempunyai tanggung jawab yang memberikan tenaga maupun pikiran untuk pengembangan wisata dengan menjaga keamanan wisata setiap minggunya, namun ada yang menjadikan pariwisata ini hanya sebagai ajang kumpul teman-teman saja dan hanya ikut jika mereka sedang tidak ada kegiatan ada juga yang menjadikan wisata ini sebagai sumber penghasilan tambahan mereka saat libur kerja di hari minggu.

Koordinasi yang telah terjadi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat Bungah menjadi pendorong dibukanya objek wisata yang terletak di area bekas penambangan dibuka untuk umum, namun disini yang melakukan koordinasi sebagian besar merupakan kelompok pemuda yang di latarbelakangi oleh faktor agar memperoleh penghasilan, mengurangi pengangguran pemudanya, mempromosikan perumahan baru, serta mengelola potensi yang ada, dan karena ikatan persahabatan, sementara di pihak

perusahaan untuk membantu warga sekitar mengembangkan potensi dan memberdayakan warga lokal. Masyarakat yang menjadi *stakeholder* wisata adalah warga yang mempunyai tanggung jawab yang memberikan tenaga maupun pikiran untuk pengembangan wisata dengan menjaga keamanan wisata setiap minggunya, namun ada yang menjadikan pariwisata ini hanya sebagai ajang kumpul teman-teman saja dan hanya ikut jika mereka sedang tidak ada kegiatan ada juga yang menjadikan wisata ini sebagai sumber penghasilan tambahan mereka saat libur kerja di hari minggu.

3. Pola Partisipasi Masyarakat Dengan Objek Wisata

Pola partisipasi antar masyarakat dengan obyek wisata adalah partisipasi secara langsung yaitu masyarakat yang ikut langsung melakukan koordinasi baik dengan pihak perusahaan maupun pemerintah setempat, sedangkan partisipasi secara tidak langsung yaitu masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam proses koordinasi pengembangan wisata mereka hanya ikut-ikutan untuk memperoleh penghasilan. Partisipasi yang terbentuk dengan adanya koordinasi antara masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, koordinasi ini menyatukan tindakan untuk mewujudkan sebuah kesepakatan bersama. Koordinasi dihasilkan akibat adanya interaksi sosial yang berjalan dengan kesatuan tindakan yang sama antar satu anggota dengan anggota yang lainnya dan adanya tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu dan kelompok.

Konsep pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan wisata sebagai ikon area hunian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu pengembangan kealamiah : kealamiah objek wisata dijaga agar pariwisata berkesinambungan terwujud untuk generasi yang akan datang, pengembangan objek wisata tidak mengubah bentuk batuan yang sudah ada melainkan menambah fasilitas penunjang yang lain, pengembangan keunikan : keunikan yang sudah ada menjadi ciri khas dijaga dan dilestarikan tidak dieksploitasi lagi, letak Bukit Jamur ditanah pegunungan dan ditengah area penambangan aktif merupakan keunikan tersendiri, pengelola selalu menjaga kebersihan serta keamanan area sekitar wisata, pengembangan tenaga kerja : wisata dibuka karena desakan warga agar membawa manfaat bagi warga sekitar serta pengembangan area wisata diimbangi dengan pengembangan tenaga kerja yang siap bekerjasama dengan perusahaan selaku pemilik lahan dan mengembangkan objek wisata.

Pola partisipasi antar masyarakat dengan obyek wisata merupakan suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi adalah berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Masyarakat yang memberikan sumbangan fisik yaitu pengelola wisata ikut langsung melakukan koordinasi baik dengan pihak perusahaan maupun pemerintah setempat, partisipasi pada pengembangan objek wisata Bukit Jamur oleh masyarakat terjadi dengan adanya keikutsertaan warga sekitar dalam penjagaan keamanan setiap minggunya, karena Bukit Jamur yang panas saat siang hari masyarakat memanfaatkannya dengan menjual minuman dingin dan makanan ringan.

Partisipasi pada pengembangan objek wisata Bukit Jamur oleh masyarakat juga terjadi secara tidak langsung seperti warga yang hanya ikut-ikutan dalam penjagaan keamanan wisata namun tidak ikut dalam proses koordinasi dengan perusahaan maupun pemerintah daerah, masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam proses koordinasi pengembangan wisata mereka hanya ikut-ikutan untuk memperoleh penghasilan. Partisipasi yang terbentuk dengan adanya koordinasi antara masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, koordinasi ini menyatukan tindakan untuk mewujudkan sebuah kesepakatan bersama, seperti perencanaan pembangunan wisata yang hanya dilakukan dan diketahui orang-orang tertentu yang menjadi penentu kebijakan bagi pengelola wisata.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berupa ide atau gagasan yang menyangkut kepentingan bersama, dalam partisipasi ini masyarakat ikut menentukan arah dan menuntut hak untuk ikut mengelola wisata yang ada didesa mereka, wujud dari partisipasi ini antara lain seperti diskusi dan sumbangan pemikiran terhadap kegiatan pengelolaan objek wisata Bukit Jamur Bungah Gresik.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Bukit Jamur yang menjadikan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengembangan wisata dapat membantu memajukan potensi yang dikembangkan dan membantu mengangkat perekonomian daerahnya. Interaksi yang terjadi merupakan wujud dari manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama. Partisipasi dari

masyarakat mulai dari perencanaan pembukaan wisata bukit jamur sampai dengan keterlibatan dalam pelaksanaan merupakan langkah awal untuk membangun kerjasama antara pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai pendorong suksesnya kebijakan tersebut dalam rangka pengembangan objek wisata, tidak jauh berbeda dengan unsur partisipasi yang dikemukakan oleh Satropetro dalam Apriyani (2012:34).

Interaksi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata terjalin sangat lama dan merupakan hubungan baik antara masyarakat sekitar dan perusahaan, interaksi tersebut terjalin karena adanya kerjasama yang berkesinambungan dari awal pembelian lahan hingga pengelolaan lahan objek wisata. Koordinasi masyarakat sebagai pengelola dengan perusahaan juga terjadi secara dinamis terus menerus sebagai bentuk dari proses pengembangan objek wisata Bukit Jamur sebagai ikon area hunian yang sedang berlangsung saat ini, tidak jauh berbeda dengan interaksi yang dikemukakan oleh Syahrial Syarbani dan Rudiya (2009: 25-26).

Bentuk interaksi sosial yang merupakan kerjasama antar individu dengan individu yang lain yang berupa kegiatan gotong royong adalah bentuk proses yang menunjukkan pada keadaan untuk mewujudkan tujuan bersama. Toleransi dan kegiatan yang tidak formal dikarenakan ada pihak yang mencoba menghindari diri dari pertikaian. Interaksi sosial antara individu dalam masyarakat terutama yang ada hubungannya dengan pengelolaan berusaha bersama mengembangkan bukit sebagai area wisata yang aman dan nyaman bagi pengunjung, tidak jauh berbeda dengan bentuk dari proses asosiatif yang dikemukakan oleh Gilin (dalam Burhan Bungin, 2009: 58-63).

Proses interaksi sosial terdapat perlawanan individu yang bersaing untuk mencari keuntungan adanya perbedaan-perbedaan dalam hal emosi, unsur kebudayaan, perilaku, prinsip, ideologi, maupun kepentingan dengan pihak lain. Perbedaan tersebut menjadi suatu pertikaian dimana pertikaian dapat menghasilkan ancaman atau kekerasan fisik, namun dalam pengelolaan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh individu dengan unsur kekerasan fisik hal ini terjadi karena tidak adanya struktur kepengurusan yang jelas terdapat perlawanan protes pembagian jadwal jaga yang merupakan bentuk dari proses disasosiatif, tidak jauh berbeda dengan bentuk dari proses disasosiatif yang dikemukakan oleh Gilin (dalam Burhan Bungin, 2009: 58-63).

Komunikasi merupakan bentuk dari interaksi yang dilatarbelakangi oleh faktor jabatan yang mereka miliki, desakan masyarakat, hubungan pribadi, dan mengurangi pengangguran para pemuda desa, sementara di pihak pemerintah ini dikarenakan untuk mendorong agar wisata dibuka untuk umum dan mengembangkan potensi yang sudah ada. Komunikasi dalam pengembangan

objek wisata merupakan usaha penyampaian informasi mengenai pengelolaan dari perusahaan kepada masyarakat muncul sebagai hal yang penting dan paling dasar dalam membangun sebuah interaksi antar manusia, tidak jauh berbeda dengan bentuk syarat interaksi sosial yang dikemukakan oleh Syahril dan Rudyanta (2009: 26).

Interaksi yang terjadi di objek wisata Bukit Jamur Bungah Gresik telah membentuk sebuah pola koordinasi, koordinasi yang terbentuk berupa bentuk koordinasi horizontal dan vertikal. Pemilik tanah dan pemerintah daerah berkoordinasi secara vertikal yang menjadi pendorong di bukanya tempat wisata bagi masyarakat umum dan sebagai pengembang utama potensi dalam pembangunan wisata tetapi juga menjadi pengawas agar tidak terjadi pungli di area wisata yang belum menjadi objek wisata resmi daerah karena kepemilikan lahan yang masih menjadi milik pribadi, sementara yang berkoordinasi secara horizontal terdiri dari warga sekitar yang terlibat dalam pengembangan wisata merupakan anggota aktif dari karang taruna, linmas, satpam, dan polsek dimana mereka mendukung melalui tenaga dengan bergantian menjaga keamanan para pengunjung agar tidak terjadi tindak kriminal, tidak jauh berbeda dengan koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2006:86-87).

Dukungan langsung ditunjukkan oleh Dinas Pariwisata yang memantau dari awal hingga saat ini walaupun belum memiliki izin resmi bukit jamur dapat beroperasi hal ini mengakibatkan pengelola semakin bersemangat dan berusaha lebih keras dalam pengembangan objek wisata. Dinas Pariwisata menunjukkan kepeduliannya terhadap objek wisata dengan melakukan pertemuan resmi dengan pengelola dan perusahaan hanya saat ada tamu khusus hanya berdasarkan keinginan mereka dan bersifat tidak resmi. Koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak jauh berbeda dengan koordinasi yang dikemukakan oleh (Hasibuan, 2006:86).

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata bukit jamur ini terjadi saat setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Partisipasi pada pengembangan objek wisata Bukit Jamur oleh masyarakat terjadi dengan adanya keikutsertaan warga sekitar dalam penjagaan keamanan setiap minggunya karena Bukit Jamur yang panas saat siang hari masyarakat memanfaatkannya dengan menjual minuman dingin dan makanan ringan, beberapa anggota karang taruna yang berkoordinasi dengan kepala desa mengenai jadwal jaga dan

penarikan uang keamanan ditempat wisata, tidak jauh berbeda dengan partisipasi yang dikemukakan oleh Rahardjo dalam Mardijono (2008:19) mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan.

Pengembangan pariwisata bukit jamur memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dimana masyarakat merupakan pelaku dan pengendali objek wisata yang akan menyambut para wisatawan sehingga mereka harus mengetahui dan memahami berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan yang berkunjung, sementara lingkungan adalah hal pokok yang harus di perhatikan, sebab pembangunan objek wisata tidak boleh berakibat pada rusak dan tercemarnya lingkungan di sekitar objek wisata tersebut, tidak jauh berbeda dengan partisipasi yang dikemukakan oleh Suwanto (1997:20) pembangunan objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki objek tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Interaksi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata

Interaksi sosial akan menghasilkan kegiatan sosial, masyarakat dimana perusahaan sebagai pemilik lahan memegang peran dibukanya wisata dengan konsekuensi mengalami kerugian hal ini terjadi akibat bentuk dari keinginan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pengembangan suatu wisata terdapat interaksi sosial yang dimulai saat warga menjual tanahnya kepada perusahaan sampai dengan keikutsertaan warga dalam pengelolaan objek wisata. Interaksi sosial adalah salah satu faktor utama dalam kehidupan sosial yang kadang menimbulkan konflik sosial karena tidak adanya struktur kepengurusan yang jelas. Kegiatan sosial untuk memperbaiki jalan terobosan ke Bukit Jamur agar tidak dilewati pengunjung karena berbahaya yang diadakan pengecekan pembatas jalan setiap minggu oleh beberapa pengelola saja sehingga terjadi kecemburuan sosial.

2. Bentuk Koordinasi Antar Masyarakat Dengan Objek Wisata Dan Pemerintah Daerah

Koordinasi vertikal berkisar pada lembaga yang lebih tinggi setingkat yaitu dinas pariwisata, perusahaan, Kepala Desa berupa sumbangan pikiran secara nyata

dengan membuat perubahan sistem kerja perusahaan yang awalnya operasional penambangan di lakukan pada hari senin sampai minggu di ubah menjadi hari senin sampai sabtu, perusahaan mengalami kerugian yang tidak sedikit dan agar dapat memberi bermanfaat bagi warga sekitar perusahaan. Warga desa yang melakukan koordinasi horizontal mereka yaitu dan Linmas, karang taruna, Satpam, Polisi Sektor Bungah suatu lembaga yang sederhana bentuk koordinasi mereka berupa sumbangan tenaga, pikiran dan barang yang mempunyai tanggung jawab terhadap ke amanan area wisata di hari minggu dalam upaya pengembangan wisata, sehingga dapat di simpulkan bahwa terdapat hubungan antara bentuk koordinasi masyarakat dengan pengembangan wisata Bukit Jamur Bungah.

3. Pola Partisipasi Antar Masyarakat Dengan Objek Wisata

Partisipasi ini menyatukan tindakan untuk mewujudkan sebuah kesepakatan bersama. Partisipasi dihasilkan akibat adanya koordinasi sosial yang berjalan dengan kesatuan tindakan yang sama antar satu anggota dengan anggota yang lainnya dan adanya tanggung jawab yang di miliki oleh setiap individu dan kelompok. Partisipasi langsung pada pengembangan objek wisata Bukit Jamur oleh masyarakat terjadi dengan adanya keikutsertaan warga sekitar dalam penjagaan keamanan setiap minggunya karena Bukit Jamur yang panas saat siang hari masyarakat memanfaatkannya dengan menjual minuman dingin dan makanan ringan, Partisipasi tidak langsung pada pengembangan objek wisata Bukit Jamur oleh masyarakat juga terjadi secara tidak langsung seperti warga yang hanya ikut-ikutan dalam penjagaan keamanan wisata namun tidak ikut dalam proses koordinasi dengan perusahaan maupun pemerintah daerah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah
Dinas Pariwisata diharapkan dapat memberikan pembekalan untuk warga maupun pengelola mengenai pengetahuan pengembangan dan manajemen wisata pada anggotanya agar pengembangan wisata dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi Perusahaan
Lebih memperhatikan keamanan agar wisata tidak membahayakan keselamatan

pengunjung selain itu di harapkan mengadakan musyawarah dengan warga dusun agar antara perusahaan dengan pihak tidak ada kesalahan komunikasi seperti area mana saja yang aman untuk pengunjung dan yang tidak aman untuk pengunjung.

3. Bagi Pengelola

Lebih siaga terhadap keamanan pengunjung serta lebih kooperatif sadar, menjaga kondisi desa rukun saling gotong royong, dan membuat struktur pengelolaan yang jelas agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, Rini. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Burhan Bungin. 2009. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasibuan, malayu. 2006. *Managemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Hilyana, Siti. 2001. *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Karakteristik Kultural Dan Struktural Masyarkat Lokal*. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Mardijono. 2008. *Persepsi dan Partisipasi Nelayan terhadap Pengelolaan kawasan Konservasi Laut Kota Batam*. Program Pasca sarjana Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Syahrial Syarbaini dan RudiYanta. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yin, K Robert. 2002. *Studi Kasus Desain Dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada